

Pengaruh Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Kota Surakarta

Vera Krisnawaty¹, Rukmini², LMS Kristiyanti³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia.

Alamat Email:

verakrisnawaty99@gmail.com¹, rukmini.stie.aas@gmail.com², lms.kristiyanti@yahoo.com³

Sitasi Artikel:

Krisnawaty, V., Rukmini, & Kristiyanti, LMS., (2024). Pengaruh Kapabilitas Anggota DPRD Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 559-567.

Abstract: *This study aims to examine and analyze the influence of DPRD members' capability factors, such as education, budget knowledge, public policy transparency, political party positions, and experience, on their role in regional financial supervision. This quantitative research uses primary data collected from 45 members of the Surakarta City DPRD for the 2019-2024 period. The results show that education, budget knowledge, public policy transparency, and experience significantly and positively affect the supervision of regional finances. On the other hand, positions in political parties do not significantly influence this role. The conclusion of this study is that the capabilities of DPRD members, particularly in terms of education, knowledge, and experience, play a crucial role in the effectiveness of regional financial supervision.*

Keywords: *DPRD capability, budget knowledge, policy transparency, regional financial supervision.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor kapabilitas anggota DPRD, seperti pendidikan, pengetahuan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, jabatan di partai politik, dan pengalaman, terhadap peran mereka dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari 45 anggota DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pengetahuan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan pengalaman anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sebaliknya, jabatan di partai politik tidak memiliki pengaruh signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kapabilitas anggota DPRD, terutama dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman, memainkan peran penting dalam efektivitas pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Kapabilitas DPRD, pengetahuan anggaran, transparansi kebijakan, pengawasan keuangan daerah.*

1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan daerah, sehingga diharapkan dapat mengurangi defisit fiskal dan mendukung kesejahteraan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang efektif membutuhkan dukungan reformasi kelembagaan dan manajemen sektor publik yang baik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Salah satu fungsi utama DPRD dalam sistem pemerintahan daerah adalah melakukan pengawasan keuangan daerah, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD menjadi krusial dalam memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel. Fungsi pengawasan ini mencakup seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Namun, dalam praktiknya, kemampuan anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan bervariasi, tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai keuangan dan anggaran daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa faktor kapabilitas personal, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan tentang anggaran, dan pengalaman anggota DPRD, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (Handoyo dan Trisnowati, 2016; Dewi, 2011). Namun, masih terdapat perdebatan tentang sejauh mana jabatan politik atau kedudukan anggota DPRD di partai politik turut mempengaruhi fungsi pengawasan ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) dan Samsiati (2013) menunjukkan bahwa jabatan politik tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua anggota DPRD memiliki posisi strategis dalam partai politik, dan faktor ini tidak serta-merta menjamin kemampuan anggota dalam melakukan fungsi pengawasan yang efektif.

Sebaliknya, penelitian oleh dan Rara (2021) mengungkapkan bahwa jabatan politik dapat memperkuat posisi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama ketika anggota tersebut memiliki pengaruh yang kuat di dalam partainya, yang memungkinkan akses terhadap sumber daya dan informasi lebih besar.

Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh jabatan politik terhadap fungsi pengawasan DPRD bersifat kontekstual dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk dinamika internal partai politik dan hubungan anggota DPRD dengan eksekutif daerah. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi kondisi di mana jabatan politik dapat berperan signifikan dalam meningkatkan atau justru melemahkan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kapabilitas yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD, khususnya di Kota Surakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang peran pendidikan, pengetahuan anggaran, transparansi kebijakan publik, jabatan di partai politik, dan pengalaman sebagai anggota DPRD dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Latar Belakang Personal (*Personal Background*)

Latar belakang personal mencakup karakteristik individu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan aspek lain yang membentuk kualitas sumber daya manusia. Pendidikan, sebagai salah satu unsur utama dari latar belakang personal, sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas publik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri guna menghasilkan individu yang berintegritas,



cerdas, dan kompeten. Dalam konteks anggota DPRD, tingkat pendidikan berperan penting dalam menentukan kemampuan mereka dalam memahami kebijakan publik dan melakukan pengawasan keuangan daerah (Sutrisno, 2016). Semakin tinggi tingkat pendidikan anggota DPRD, semakin baik kapasitas mereka untuk menjalankan tugas pengawasan dengan efektif.

2.2. Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

Pengetahuan tentang anggaran mengacu pada kemampuan anggota DPRD dalam memahami mekanisme penyusunan dan pelaksanaan APBD, mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, hingga pelaporan. Fungsi penganggaran DPRD menjadi sangat strategis ketika anggota memiliki pengetahuan yang mendalam tentang anggaran, yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam proses tersebut (Aprianto, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peran DPRD dalam pengendalian APBD sangat signifikan jika didukung oleh kemampuan memahami kebijakan keuangan, pengelolaan anggaran, serta regulasi yang berlaku. DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembentuk anggaran yang bertanggung jawab dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2.3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menjamin akses terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang diperoleh, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel (Siswanto, 2014). Transparansi juga berperan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap keuangan daerah. Dalam studi yang dilakukan oleh Sabaria et al. (2018), transparansi kebijakan publik terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat dan DPRD untuk memantau alokasi dan penggunaan anggaran secara lebih detail.

2.4. Jabatan di Partai Politik

Jabatan di partai politik mencerminkan kedudukan anggota DPRD dalam struktur organisasi partai politik yang mendukung mereka. Jabatan ini sering kali memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi, sumber daya, dan pengaruh politik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peran pengawasan keuangan daerah (Nugroho, 2018). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jabatan di partai politik terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah tidak selalu signifikan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Amalia (2013) dan Samsiati (2013), menunjukkan bahwa meskipun anggota DPRD memiliki jabatan di partai politik, hal ini tidak serta-merta memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan. Sebaliknya, jabatan politik yang tinggi bisa jadi mengurangi objektivitas dalam pengawasan akibat keterikatan dengan kepentingan partai.

2.5. Pengalaman sebagai Anggota DPRD

Pengalaman sebagai anggota DPRD mengacu pada durasi dan intensitas keterlibatan anggota dalam menjalankan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Semakin lama pengalaman seseorang di lembaga legislatif, semakin besar kemungkinan mereka untuk memahami dinamika pemerintahan dan memiliki kompetensi dalam mengawasi pelaksanaan APBD (Kartikasari, 2012). Pengalaman praktis ini memberikan anggota DPRD keunggulan dalam hal pengetahuan teknis dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Jafar (2021) menyimpulkan bahwa pengalaman anggota DPRD secara signifikan meningkatkan efektivitas mereka dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Pengalaman memberikan anggota DPRD pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur, regulasi, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

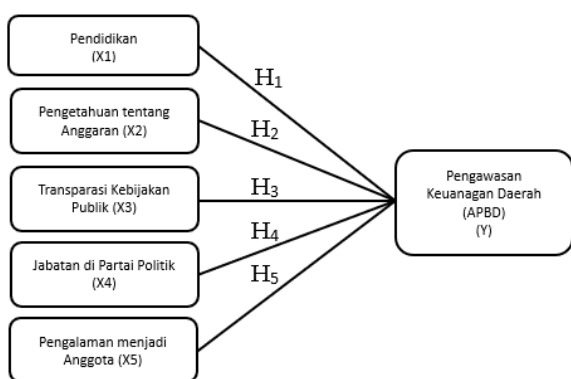
2.6. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses yang dilakukan oleh DPRD untuk memastikan bahwa APBD dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Pengawasan ini mencakup seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga



pelaporan, dengan tujuan utama untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan dana publik (Kuswandi, 2016). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, kebijakan pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di bidang pembangunan. Pengawasan yang baik oleh DPRD akan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik (good governance) di daerah.

2.7. Kerangka Pemikiran



- H1: Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD.
- H2: Pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD.
- H3: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD.
- H4: Jabatan di partai politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh anggota DPRD.
- H5: Pengalaman menjadi anggota DPRD berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kapabilitas anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 45 anggota DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel jenuh digunakan karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan daerah, sehingga penting untuk melibatkan mereka semua dalam penelitian.

Variabel independen dalam penelitian ini mencakup pendidikan (X1), pengetahuan tentang anggaran (X2), transparansi kebijakan publik (X3), jabatan di partai politik (X4), dan pengalaman sebagai anggota DPRD (X5). Sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah pengawasan keuangan daerah (Y). Data diukur menggunakan skala Likert dengan skala 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan "sangat tidak setuju" dan 5 menunjukkan "sangat setuju."

Sebelum analisis dilakukan, data diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan Pearson Correlation, di mana instrumen dinyatakan valid jika nilai korelasinya lebih besar dari nilai r-tabel. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai ambang lebih besar dari 0,60 untuk menunjukkan konsistensi instrumen.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas dengan grafik normal probability plot, uji multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor (VIF), dan uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Semua uji ini dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat untuk analisis regresi.

Pengujian hipotesis, digunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap pengawasan keuangan daerah adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots (1)$$

Setelah itu, dilakukan uji-t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, dan uji-F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Terakhir, koefisien determinasi (R²) digunakan untuk melihat sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dan semua analisis dilakukan



menggunakan software statistik SPSS.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pendidikan	45	21	34	28,80	2,793
Pengetahuan tentang Anggaran	45	24	30	27,38	1,838
Transparansi Kebijakan Publik	45	24	30	26,62	2,015
Jabatan di Partai Politik	45	20	30	26,16	2,335
Pengalaman menjadi Anggota DPRD	45	15	25	22,20	2,282
Pengawasan Keuangan Daerah	45	32	39	35,36	1,348
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Output SPSS 23

Penelitian ini menggunakan 45 responden yang merupakan anggota DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, variabel pendidikan (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,80 dengan standar deviasi 2,793, yang menunjukkan variasi tingkat pendidikan responden yang cukup besar. Pengetahuan tentang anggaran (X2) memiliki rata-rata sebesar 27,38 dengan standar deviasi 1,838, menunjukkan pengetahuan yang relatif baik di antara anggota DPRD. Transparansi kebijakan publik (X3) memiliki rata-rata 26,62, dengan standar deviasi 2,015. Jabatan di partai politik (X4) memiliki rata-rata 26,16, sementara pengalaman sebagai anggota DPRD (X5) memiliki nilai rata-rata sebesar 22,20 dengan standar deviasi 2,282. Variabel pengawasan keuangan daerah (Y) menunjukkan nilai rata-rata 35,36 dengan standar deviasi 1,348 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Validitas			Reliabilitas		
	Pearson Correlation	R tabel	Ket.	Cronbach Alpha	Nilai normal	Ket.
	0,551					
	0,570					
	0,717					
X1	0,457	0,294	Valid	0,649	0,60	Reliable
	0,788					
	0,573					
	0,327					

X2	0,538	0,294	Valid	0,671	0,60	Reliable
	0,644					
	0,595					
	0,660					
	0,554					
	0,641					
X3	0,676	0,294	Valid	0,681	0,60	Reliable
	0,625					
	0,614					
	0,640					
	0,756					
	0,545					
X4	0,752	0,294	Valid	0,730	0,60	Reliable
	0,713					
	0,586					
	0,531					
	0,772					
	0,732					
X5	0,732	0,294	Valid	0,802	0,60	Reliable
	0,783					
	0,730					
	0,624					
	0,596					
	0,555					
Y	0,565	0,294	Valid	0,698	0,60	Reliable
	0,482					
	0,612					
	0,531					
	0,604					

Sumber: Output SPSS 23

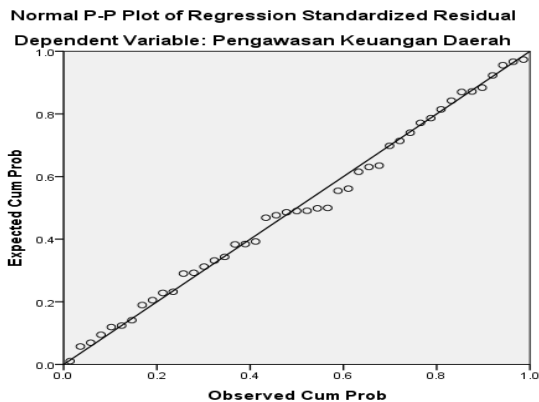
Pada uji validitas, semua variabel penelitian memiliki nilai korelasi Pearson yang lebih besar dari r-tabel, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dan dapat dipercaya.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik untuk



memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis lanjut.



Gambar 1. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendidikan	0,790	1,267
Pengetahuan tentang Anggaran	0,822	1,216
Transparansi Kebijakan Publik	0,934	1,071
Jabatan di Partai Politik	0,860	1,162
Pengalaman menjadi Anggota DPRD	0,903	1,107

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,901 ^a	0,812	0,788	0,620	2,075

Sumber : Output SPSS 23

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, yang ditunjukkan oleh grafik normal probability plot yang mengikuti garis diagonal. Uji multikolinieritas juga tidak menunjukkan adanya masalah, dengan nilai VIF di bawah 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,1, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen. Uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson sebesar 2,075 menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi dalam model regresi.

4.3. Analisis Regresi

Persamaan regresi linier yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	13,105	1,934	
Pendidikan	0,225	0,038	0,466
Pengetahuan tentang Anggaran	0,127	0,056	0,174
Transparansi Kebijakan Publik	0,399	0,048	0,596
Jabatan di Partai Politik	-0,024	0,043	-0,042
Pengalaman menjadi Anggota DPRD	0,104	0,043	0,175

Sumber: Output SPSS 23

$$Y = -13,105 + 0,225X_1 + 0,127X_2 + 0,399X_3 - 0,024X_4 + 0,104X_5 \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan model tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan memiliki koefisien unstandardized sebesar 0,225 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel pendidikan akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,225 unit. Nilai koefisien standardised sebesar 0,466 mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dan merupakan variabel dengan pengaruh yang kuat.

Koefisien unstandardized variabel pengetahuan anggaran sebesar 0,127 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengetahuan anggaran akan meningkatkan pengawasan keuangan sebesar 0,127 unit. Koefisien standardised sebesar 0,174 mengindikasikan bahwa variabel ini juga berpengaruh, meskipun tidak sekuat pendidikan.

Koefisien unstandardized variabel transparansi kebijakan publik sebesar 0,399 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam transparansi kebijakan publik akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,399 unit. Nilai koefisien standardised sebesar 0,596 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh paling kuat di antara variabel lainnya dalam meningkatkan pengawasan.

Koefisien unstandardized variabel jabatan di partai politik sebesar -0,024 menunjukkan bahwa jabatan di partai politik memiliki pengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Namun, nilai ini sangat kecil dan koefisien standardised sebesar -0,042 menunjukkan bahwa pengaruhnya paling rendah dibandingkan dengan variabel yang lainnya.

Koefisien unstandardized sebesar 0,104 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengalaman anggota DPRD akan



meningkatkan pengawasan keuangan daerah sebesar 0,104 unit. Koefisien standardized sebesar 0,175 menunjukkan bahwa pengalaman anggota DPRD juga berpengaruh signifikan, meskipun tidak sekuat transparansi atau pendidikan.

4.4. Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji F (Hasil Uji kelayakan modal)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	64,962	5	12,992	33,770	0,000b

Sumber: Output SPSS 23

Nilai F hitung sebesar 33,770 dengan nilai signifikansi (Sig.) 0,000b menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% ($p < 0,05$). Ini berarti bahwa variabel-variabel independen (pendidikan, pengetahuan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, jabatan di partai politik, dan pengalaman sebagai anggota DPRD) secara simultan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

Tabel 7. Hasil Uji t (Hasil Uji Secara Parsial)

Model	T	Sig.	Simpulan
(Constant)	6,776	0,000	
Pendidikan	5,975	0,000	Signifikan
Pengetahuan tentang Anggaran	2,271	0,029	Signifikan
Transparansi Kebijakan Publik	8,298	0,000	Signifikan
Jabatan di Partai Politik	-0,560	0,579	Tidak Signifikan
Pengalaman menjadi Anggota DPRD	2,402	0,021	Signifikan

Sumber: Output SPSS 23

Tabel 7 menunjukkan hasil uji parsial dari setiap variabel independen. Pendidikan ($T = 5,975$; Sig. = 0,000), pengetahuan tentang anggaran ($T = 2,271$; Sig. = 0,029), transparansi kebijakan publik ($T = 8,298$; Sig. = 0,000), dan pengalaman sebagai anggota DPRD ($T = 2,402$; Sig. = 0,021) semuanya menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah ($p < 0,05$). Sebaliknya, jabatan di partai politik ($T = -0,560$; Sig. = 0,579) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ($p > 0,05$), sehingga jabatan ini tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,901a	0,812	0,788

Sumber: Output SPSS 23

Tabel 8 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,812, yang berarti bahwa 81,2% variasi dalam pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,788 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, model ini masih menjelaskan sekitar 78,8% variasi pengawasan keuangan daerah. Ini menunjukkan model yang kuat dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

4.5. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Jafar (2021), yang menemukan bahwa anggota DPRD dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan anggota DPRD kemampuan analitis dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengawasan keuangan.

Pengetahuan tentang anggaran juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, mendukung temuan Amalia (2013). Pengetahuan yang mendalam mengenai proses anggaran memungkinkan anggota DPRD untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Fungsi pengawasan ini menjadi lebih kuat ketika anggota DPRD memahami secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, yang konsisten dengan hasil penelitian Sabaria et al. (2018). Transparansi meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini memudahkan anggota DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD secara lebih efektif, karena masyarakat dapat turut serta memantau dan



memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengalaman sebagai anggota DPRD juga ditemukan berpengaruh signifikan. Anggota DPRD dengan pengalaman yang lebih lama memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pengelolaan keuangan dan mekanisme pengawasan. Hasil ini mendukung penelitian Kartikasari (2012) yang menunjukkan bahwa pengalaman memberikan keunggulan dalam memahami prosedur dan regulasi terkait anggaran.

Sebaliknya, jabatan di partai politik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Amalia (2013) dan Samsiati (2013), yang menyatakan bahwa jabatan di partai politik tidak selalu meningkatkan kapabilitas anggota DPRD dalam melakukan pengawasan. Jabatan politik mungkin lebih terkait dengan peran strategis di partai, namun tidak selalu mencerminkan kemampuan teknis dalam pengawasan keuangan daerah. Bahkan, konflik kepentingan yang mungkin muncul dari posisi dalam partai politik dapat mengurangi objektivitas anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas anggota DPRD, terutama dalam hal pendidikan, pengetahuan anggaran, transparansi kebijakan publik, dan pengalaman, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Temuan ini memperkuat pentingnya upaya peningkatan kompetensi anggota DPRD dalam bidang-bidang tersebut untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel di tingkat daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas anggota DPRD memainkan peran penting dalam pengawasan keuangan daerah. Secara khusus, pendidikan, pengetahuan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan pengalaman sebagai anggota DPRD memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan tentang anggaran, dan pengalaman anggota DPRD,

semakin baik kemampuan mereka dalam mengawasi pelaksanaan APBD secara efisien, akuntabel, dan transparan. Transparansi kebijakan publik juga menjadi faktor penting yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran daerah.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa jabatan di partai politik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggota DPRD memiliki jabatan di partai politik, posisi tersebut tidak selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan yang efektif. Faktor teknis seperti pendidikan dan pengetahuan lebih menentukan keberhasilan pengawasan dibandingkan posisi politik.

Oleh karena itu, disarankan agar peningkatan kompetensi anggota DPRD dalam hal pendidikan dan pengetahuan tentang anggaran terus ditingkatkan melalui program pelatihan dan pengembangan. Selain itu, transparansi dalam proses kebijakan publik harus terus didorong untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik di tingkat daerah.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah penggunaan sampel yang terbatas hanya pada anggota DPRD Kota Surakarta. Hal ini mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi DPRD di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan melibatkan anggota DPRD dari berbagai daerah atau provinsi agar hasil penelitian lebih generalizable. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti keterlibatan masyarakat atau hubungan anggota DPRD dengan eksekutif daerah.

7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih terhadap



ITB AAS Surakarta yang selalu membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. (2013). *Pengaruh Jabatan Politik Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Klaten*. *Jurnal Nominal*, 8(2), 235-247.
- Aprianto, A. (2017). Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan APBD: Studi Pada DPRD Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Publik*, 12(1), 78-92.
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta. Depdiknas.
- Dewi, I. M. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Handoyo, B., & Trisnowati, S. (2016). Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Smooting Journal*, 9(5), 45-58.
- Jafar, M. (2021). Faktor-Faktor Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gowa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(2), 93-108.
- Kartikasari, D. (2012). Pengaruh Personal Background dan Political Background Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Boyolali. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 47-59.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45.
- Nugroho, A. (2018). Pengaruh Jabatan di Partai Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15(3), 145-159.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Rara, P. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kota Solok). *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas
- Sabaria, N., Totanan, C., & Jamaluddin. (2018). Pengaruh Anggaran, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(3), 120-130.
- Samsiati, S. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Luwu). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Siswanto, W. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(2), 43-59.
- Sutrisno, E. (2016). Pendidikan Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pendidikan*, 22(3), 112-127.

